

KOLONISASI DAN KEKUASAAN ITALIA DI AFRIKA TIMUR

TAHUN 1934-1943

A. Latar Belakang

Ethiopia adalah sebuah negara yang terletak di Benua Afrika dan mendapatkan julukan sebagai negara Tanduk Afrika. Negara ini seluruhnya terletak di garis lintang tropis dan relatif kompak dengan dimensi utara-selatan dan timur-barat yang serupa. Ibukotanya adalah Addis Ababa “Bunga Baru” yang terletak hampir di tengah negara sebagai pusatnya. Ethiopia adalah negara terbesar dan terpadat di Tanduk Afrika (Kresna et al., 2018). Dengan pemisahan diri Eritrea pada tahun 1993 sebagai bekas provinsi di Laut Merah, Ethiopia menjadi negara yang tidak memiliki daratan. Libya merupakan negara yang terletak di pusat Benua Afrika terutama di bagian wilayah utara (Indrawan, 2013). Sebelah wilayah utara dibatasi oleh laut, di bagian wilayah timur berbatasan dengan wilayah Mesir dan Sudan, di bagian selatan berbatasan dengan Chad dan Nigeria, dan bagian barat berbatasan dengan Aljazair dan Tunisia. Lokasi Libya sangat strategis karena dimasa lalu negara ini telah menjadi sasaran dari para penakluk Eropa. Terdapat beberapa bangsa yang ingin menaklukan Negara Libya, yaitu Polinesia, Yunani, Romawi, dan Italia yang telah berhasil menduduki wilayah Libya terutama sepanjang pantai Timur Tengah. Italia menjadi negara Eropa yang terakhir menyerbu Libya dan datang pada Tahun 1911.

Eritrea merupakan negara kecil yang terletak di Afrika Timur dengan total panjang perbatasan 110 KM. Letaknya di bagian timur benua Afrika, berhadapan langsung dengan Laut Merah dan Teluk Aden (Mesfin, 2008). Kedua negara ini dulunya merupakan wilayah jajahan Eropa, tepatnya wilayah jajahan Italia yang kini menjadi Eritrea dan wilayah jajahan Perancis yang kini menjadi wilayah kedaulatan Djibouti. Kedua negara ini sama-sama terletak di kawasan Tanduk Afrika. Tanduk Afrika adalah subkawasan Afrika Timur yang membentang dari Eritrea di utara hingga Mozambik di selatan. Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya menjadi salah satu negara di Afrika yang kerap mendapat perhatian global karena gejolak yang terjadi di negaranya

(Erlina, 2019). Gejolak di Ethiopia diartikan sebagai situasi yang tidak tenang, tidak menguntungkan, dan suasana terjadi kekeruhan kondisi sehingga tidak terkendali sesuai keinginan sebagai negara berdaulat. Gejolak ini memiliki konotasi yang mengarah pada suasana kekacauan, pergolakan, dan kegelisahan atau pergulatan fisik yang tidak terkendali.

Pergolakan di Etiopia, Eritrea, dan Libya dapat dilihat sebagai kisah berkelanjutan yang dimulai sekitar masa ini dengan kolonialisme Eropa di benua Afrika (Kresna et al., 2018). Kolonialisme adalah dominasi langsung dan total atas negara lain berdasarkan kekuatan asing. Tujuan kolonialisme yang pertama adalah dominasi politik, sedangkan tujuan kedua adalah eksploitasi terhadap negara yang dijajah. Jika berbicara tentang kolonialisme di Afrika, ada fenomena yang terjadi antara tahun 1800 hingga 1960. Sebuah fenomena yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena ini adalah imperialisme dan faktanya kolonialisme adalah bentuk langsung dari imperialisme. Dapat diartikan bahwa semua kolonialisme adalah imperialisme, tetapi tidak semua imperialisme adalah kolonialisme. Terkait dengan pergolakan yang terjadi di Ethiopia, jika dicermati, pergolakan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi antara Ethiopia dengan bangsa Eropa yang saat itu sangat bercita-cita untuk menguasai kawasan Afrika (Ocheni & Nwankwo, 2012). Negara Eropa yang paling dominan adalah Italia, disusul beberapa negara Eropa lainnya yang menguasai wilayah sekitar Ethiopia, Eritrea, dan Libya.

Sebelum berlakunya kolonisasi Italia pada tahun 1885, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Eritrea dikuasai oleh berbagai kekuatan lokal dan internasional yang lambat laun mendominasi wilayah Laut Merah. Pada tahun 1896, orang Italia menggunakan Eritrea sebagai batu loncatan dalam upaya mereka untuk menaklukkan Ethiopia (Pankhurst, 1999). Setelah Italia menyerah pada Perang Dunia II, Eritrea berada di bawah kekuasaan militer Inggris. Pada tahun 1952, resolusi PBB untuk menyatukan Eritrea dan Ethiopia mulai berlaku. Resolusi tersebut mengabaikan tuntutan kemerdekaan Eritrea, namun menjamin hak demokrasi dan otonomi bagi

warga Eritrea. Namun, segera setelah ketentuan ini mulai berlaku, hak-hak ini mulai dibatasi atau dilanggar. Hal tersebut telah memberikan dampak yang besar bagi pergolakan di Ethiopia, Eritrea, dan Libya (Kresna et al., 2018). Dampak pergolakan tersebut muncul dalam bentuk krisis, perlawanan, dan sebagainya yang terjadi pada negara-negara yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji topik yang berkaitan dengan judul, yaitu “Kolonisasi dan Kekuasaan Italia di Afrika Timur Tahun 1934-1943”.

B. Koloni Italia di Wilayah Afrika

Dua koloni utama Italia di Afrika pada abad ke-20 adalah Libya saat ini (terdiri dari Libya Italia, Cyrenaica Italia, dan Tripolitania) dan Afrika Timur Italia (termasuk wilayah dengan nama yang sama, serta Eritrea Italia dan Etiopia Italia, Somalia, Italia). Dalam kasus Libya Italia, setelah perang singkat Italia-Turki melawan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1911, Italia menguasai Tripolitania dan Cyrenaica dan memperoleh pengakuan internasional berkat Perjanjian Lausanne Tahun 1923 (Pankhurst, 1999). Setelah “perdamaian” yang sulit dan berdarah pada tahun 1920-an, kedua wilayah tersebut disatukan dengan nama “Libya” pada tahun 1934. Pada tahun 1943, selama Perang Dunia II, Italia diusir bersama sekutu Jermannya dan kehilangan kendali atas wilayah tersebut, namun memperoleh kembali kemerdekaan setelah konflik berakhir pada tahun 1951.



Gambar 1. Peta negara yang menjajah Afrika

Sumber: <https://www.slideshare.net/AdrianaLA1/kolonialisme-bangsa-eropa-di-afrika>

Eritrea, sebaliknya, sudah menjadi bagian dari wilayah Afrika Timur Italia, namun menjadi koloni Italia pada tahun 1889 setelah Perjanjian Uchale (James, 1890) ditandatangani antara Ethiopia dan Italia. Setelah Perang Italia-Ethiopia Pertama (1895-1896) dan kekalahan telak Italia pada Pertempuran Adwa, yang pada saat itu dianggap oleh banyak orang sebagai hilangnya kehormatan nasional, benih-benih balas dendam Italia disemai dan membuahkan hasil setelah Perang Italia-Etiopia Kedua. Perang Italia. Perang Etiopia: Perang Etiopia (1935-1936) berakhir dengan penaklukan Abyssinia. Mengenai wilayah Somalia, invasi Italia dimulai pada tahun 1890 dalam bentuk protektorat, yang mencakup wilayah Jubaland pada tahun 1920, dan diperkuat oleh pendudukan Somalia Inggris pada tahun 1940 (Wicaksana & Rachman, 2018). Wilayah-wilayah ini disatukan dengan nama "Afrika Timur Italia" (1936), dan termasuk Abyssinia (Ethiopia) yang ditaklukkan, dipertahankan, hingga dikalahkan.

C. Sejarah Pergolakan di Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Sejarah pergolakan yang terjadi di Etiopia, Eritrea, dan Libya sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi antara negara tersebut dengan pihak Eropa yang sebenarnya sedang berusaha menguasai kawasan Afrika saat itu. Salah satu negara terkuat di Eropa adalah Italia yang disusul beberapa negara Eropa lainnya yang menguasai wilayah sekitar Ethiopia, Eritrea, dan Libya.

1. Italia Dalam Perang Dunia I Di Afrika

Italia adalah sebuah negara di semenanjung Italia. Semenanjung Italia terletak di selatan Eropa, yang bentuknya seperti sepatu laras panjang. Di masa lalu, semenanjung ini adalah rumah bagi banyak negara. Namun, saat ini hampir seluruh semenanjung hanya dihuni oleh satu negara, yakni Italia. Dalam bahasa Italia, proses penyatuan dikenal dengan nama "Risorgimento" yang artinya "kebangkitan" (Zulham,

2016). Unifikasi atau penyatuan Italia adalah proses menyatukan dan menggabungkan banyak negara yang sebelumnya menduduki semenanjung Italia hingga akhirnya menjadi satu negara, Italia modern.

Italia melakukan proses unifikasi pada tahun 1870, namun belum menjadi negara pemimpin. Karena letak geografisnya, kekayaan alamnya dan terutama keberadaan tambangnya, Italia tidak mampu menandingi status perkembangan negara-negara Eropa kontinental karena lemahnya kapitalisme. Karena Italia bukanlah negara yang kuat, situasi politik luar negerinya tidak stabil, sehingga Italia berusaha membentuk aliansi atau aliansi dengan kekuatan-kekuatan Eropa Barat demi kepentingan Italia. Melalui usahanya yakni memperoleh koloni di Afrika bagian utara dan timur. Italia dikalahkan oleh Ethiopia dalam Pertempuran Adua pada tahun 1896. Negarawan Tuscan Fernando Martini menggambarkan "imperialisme orang-orang yang dirampas" dalam bukunya tahun 1879, yaitu "Cose Africane atau Concerning Afrika" (Pankhurst, 1999). Dia mendukung kebijakan imigrasi ke koloni Italia. Dalam hal ini, koloni tidak mementingkan industri, keuangan, kebutuhan bahan mentah, atau bahkan pertahanan militer, tetapi mengatasi fenomena kelebihan penduduk di dalam negeri.



Gambar 2. Sekutu Italia dalam Perang Dunia I di Afrika

Sumber: <https://images.app.goo.gl/dvGenDSjRHWhDNWg7>

Fenomena kelebihan populasi mendorong imigrasi yang cepat. Penduduknya cenderung bermigrasi ke Amerika Serikat. Jika fenomena migrasi ini terus berlanjut maka akan berdampak buruk bagi Italia baik secara politik maupun ekonomi. Bahkan, mereka yang bermigrasi akan mengalami perubahan peradaban, bahasa, dan gengsi Italia. Tak hanya itu, jumlah orang yang bermigrasi ke negara lain juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan keturunan Italia melupakan budaya, bahasa dan peradaban nenek moyangnya (Mesfin, 2008). Oleh karena itu, kelebihan populasi tersebut ditampung di beberapa koloni yang diawasi langsung oleh negara induknya. Dengan pendapatnya, Fernando Martini diangkat menjadi gubernur sipil Eritrea untuk Italia.

Sebelum pecahnya Perang Dunia I, Italia mempunyai wilayah jajahan di Afrika yaitu Libya, Eritrea, dan Somaliland. Luas total koloni ini kira-kira 700.000 mil persegi, enam kali luas kota besar. Dari ketiga wilayah jajahan tersebut, Libya mempunyai wilayah terluas, namun wilayah tersebut tidak subur (Sulistiowati, 2021). Pada tahun 1912, wilayah tersebut menjadi bagian dari Italia, yang memperluas koloninya hingga ke pedalaman pada tahun berikutnya. Ketika Italia memperluas wilayahnya, mereka berhadapan dengan Sa'id Idris, yang juga dikenal sebagai Sanusi, seorang pemimpin agama Muslim yang sangat menentang pemerintahan Italia sehingga Said Idris as Sanusi berjuang hingga tahun 1931.

Selama Perang Dunia I, Italia menerima undangan Inggris untuk bergabung dengan Sekutu. Ini merupakan langkah awal Italia untuk mempertahankan dan memperluas wilayahnya di Afrika. Pada tahun 1882 Italia bergabung dengan Triple Alliance (Sulistiowati, 2021). Namun selama perang, Italia mengambil sikap netral dan tidak memihak wilayah tengah. Artinya perjanjian rahasia yang

ditandatangani antara Perancis dan Italia pada tahun 1902 mulai berlaku kembali. Pada tahun 1915, sebuah perjanjian rahasia antara Sekutu dan Italia ditandatangani di London. Perjanjian rahasia tersebut menyatakan bahwa ``Jika Italia ikut perang dan memihak Sekutu, maka Italia akan menerima bantuan, yaitu dana, dan dijanjikan wilayah tambahan, yaitu Afrika, Austria, dan Turki.

Pada tahun 1915, Italia menyerukan perang melawan Austria, yang dimenangkan Italia. Namun ketentuan perjanjian rahasia antara Sekutu dan Italia tidak terpenuhi. Pada tahun 1919, Italia diberi wilayah kecil, berbeda dengan Perancis yang diberi oasis Ghadames dan Ghats. Inggris membebaskan Italia dan menguasai Oasis Kufra dan sekitarnya yang menjadi pusat pergerakan Sanusi. Sayangnya Italia meminta wilayah antara Libya dan Danau Chad, namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan akan merugikan Perancis karena akan mempengaruhi hubungannya dengan Afrika Barat, Perancis dan Afrika Equatorial Perancis. Setelah Perang Dunia I, Italia sangat kecewa dengan keputusan perdamaian tersebut, karena sebagian besar harapan Italia untuk menguasai wilayah di benua Afrika yang merupakan bekas jajahan Jerman tidak terpenuhi dan tidak dapat memperoleh wilayah tambahan di Asia Kecil (Njoo, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Perang Dunia I, Italia merupakan satu-satunya negara imperialis yang secara serius berupaya memperluas jangkauannya di Afrika, tetapi Italia gagal.

2. Ekspansi Italia di Afrika, yaitu Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Ambisi untuk melakukan ekspansi kembali datang dari kaum Fasis yang menguasai Italia. Benito Mussolini atau lebih dikenal sebagai Mussonlini, adalah seorang pemimpin politik Italia yang merupakan diktator fasis Italia dari tahun 1925 hingga 1945 (ARYANI, 2010). Mussolini, seorang sosialis revolusioner, memulai gerakan fasis paramiliter pada tahun 1919 dan menjadi perdana menteri pada tahun

1922. Mussolini berupaya memulihkan status Kekaisaran Romawi kuno. Oleh karena itu, agar nasib Italia tidak menyerupai “tawanan Mediterania”, Italia harus menguasai Mediterania. Untuk mewujudkan keinginannya menguasai Mediterania, Italia harus menghadapi banyak negara seperti Albania, Inggris Raya, Prancis, Spanyol, dan Turki, serta upaya Mussolini untuk mencari sekutu.

Berikut prestasi-prestasi pada masa pemerintahan Mussolini yang berkaitan langsung dengan kebijakan imperialis. Pertama, merebut posisi sentral pasukan Sanusi, yaitu Oasis Kufra. Ia kemudian memerintah Ethiopia pada tahun 1936 dan menobatkan Raja Italia Victor Emmanuel III menjadi Kaisar Ethiopia. Ketiga, Albania dipersatukan dengan Italia, suatu kesatuan pribadi yang kemudian dilayani oleh Raja Victor Emmanuel III. Ia dilantik sebagai Raja Albania dan memberikan pemerintahan Mussolini kendali atas Laut Adriatik (ARYANI, 2010).



Gambar 3. Perang Italia di wilayah Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Sumber: <https://images.app.goo.gl/uW3L1JF6yLpqUCwa8>

Pada tahun 1935, Italia menguasai Ethiopia yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Haile Selassie I. Haile Selassie I digantikan oleh Permaisuri Zauditu pada tahun 1930 (Pankhurst, 1999). Sebelum menjadi kaisar, Haile Selassie menjabat sebagai penasihat utama Zayditu, Mankubumi, dan ahli warisnya. Pada masa ini, Haile Selassie terlibat dalam pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta program pengiriman anak-anak Ethiopia untuk belajar ke luar negeri, hingga Haile Selassie I berhasil mendapatkan akses dan mendirikan negara Ethiopia pada tahun 1923. Ia juga mempunyai pengaruh yang besar dalam administrasi nasional termasuk manajemen. Ia bergabung dengan organisasi internasional dan berhasil menghapuskan perbudakan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 1902, Ethiopia berjanji kepada Inggris bahwa tidak ada negara yang akan menggunakan air Danau Tana. Danau Tana berperan penting bagi Inggris karena salah satu sumber airnya adalah Sungai Nil Biru yang digunakan untuk mengairi perkebunan kapas di Sudan. Pada tahun 1906 perjanjian yang mengikat ditandatangani antara Inggris Raya, Perancis dan Italia (Sulistiowati, 2021). Perjanjian tersebut menyatakan bahwa "tidak ada negara yang boleh bertindak melawan Ethiopia tanpa persetujuan dan sepengetahuan negara lain".

Sekutu dan Italia menandatangani perjanjian rahasia pada tahun 1915. Namun pada tahun 1919, pelaksanaan perjanjian rahasia tersebut tidak terpenuhi, khususnya bagi Italia, terutama mengenai persoalan peningkatan wilayah Afrika. Italia menuntut kompensasi dari Ethiopia untuk mengungkapkan kekecewaannya. Italia kemudian menandatangani perjanjian persahabatan dengan Ethiopia pada tahun 1928 (Pankhurst, 1999). Perjanjian tersebut mencakup pembangunan ekonomi dan perluasan Ethiopia dan Eritrea. Hal ini dicapai dengan membangun jalan raya yang membentang dari Dessi, ibu kota negara bagian Wollo di Etiopia, hingga kota Assab di Eritrea di pantai Laut

Merah. Perjanjian persahabatan ini memungkinkan Italia untuk menyerang pertahanan alami Ethiopia yang hanya berupa wilayah gurun.

Pada tahun 1934, Haile Selassie I memodernisasi negara dan memperkuat militernya. Langkah Haile Selassie ini merupakan respons terhadap upaya memperluas sistem pertahanan Italia di wilayah Somalia dan Eritrea, yang memicu kemarahan di Italia atas serangan tersebut (Mesfin, 2008). Sejumlah insiden juga terjadi tahun ini, termasuk bentrokan antara Warwai dan pasukan patroli di wilayah perbatasan. Ketika Italia mengirim pasukan ke kawasan Afrika, Ethiopia melaporkan hal tersebut ke PBB. Namun, lembaga nasional tersebut belum menyelidiki keseluruhan masalah yang muncul antara Italia dan Ethiopia. Perancis dan Italia menandatangani perjanjian di Roma pada Januari 1935. Kedua negara takut terhadap Jerman, yang saat itu sangat maju secara politik dan merupakan ancaman bagi kemerdekaan Austria.

Mussolini beralih ke Prancis, yang diterima dengan baik dan Perjanjian Mussolini-Laval ditandatangani. Perjanjian Laval Mussolini: (1) Jika situasi di Austria terancam serius, kedua belah pihak akan berkonsultasi. (2) Prancis memberi Libya tambahan 45.000 mm wilayah dan beberapa warga Somalia Prancis untuk berintegrasi dengan Eritrea, dan memberi Italia akses ke sebagian Sahara dan Teluk Aden. (3) Italia dapat melakukan investasi dalam bentuk saham dalam pembangunan jalur kereta api Prancis antara Addis Ababa dan Djibouti. (4) mengupayakan terjalinnya hubungan baik antara kedua negara di Tunisia, memperoleh hak membangun lembaga pendidikan dan hak kewarganegaraan khusus bagi penduduk Italia (Watt, 1971).

Berdasarkan perjanjian rahasia, Italia akhirnya diizinkan beroperasi di Ethiopia. Ethiopia akan digunakan sebagai sumber bahan mentah untuk

memperkaya Italia, sumber pangan bagi Italia, dan sumber tenaga kerja bagi Italia Fasis. Jika kita melihat isi Perjanjian Laval yang diusung Mussolini, kita dapat melihat bahwa hal tersebut memberikan manfaat yang besar bagi Italia (ARYANI, 2010). Hal ini karena Perjanjian Laval Mussolini memasukkan klausul yang ``memberikan kebebasan bertindak kepada Ethiopia," dan resonansi dari klausul ini dianggap sangat penting. Antara tahun 1936 dan 1942, Ethiopia kehilangan kemerdekaannya. Victor Emmanuel III adalah Kaisar Etiopia. Pada tahun 1936, Afrika Timur Italia dibentuk, termasuk wilayah Ethiopia, Eritrea, Italia, dan Somalia (Watt, 1971). Militerisasi Afrika Timur Italia kemudian dilakukan dengan aksi lanjutan penaklukan Somalia Prancis, Sudan, Kenya, dan Uganda.

Italia telah mengembangkan "rencana enam tahun" untuk mengeksploitasi kekayaan alam Ethiopia. Selain mineral, Italia juga mengharapkan produk pangan seperti kapas, wol, dan gandum. Italia berencana menggunakan bahan tambang seperti besi dan batu bara untuk membangun pabrik baja, rel kereta api, meriam, dan senjata api. Namun, rencana hanyalah sebuah rencana. Hasil yang diharapkan belum tercapai selama hampir satu setengah tahun karena sanksi dari organisasi negara dan terus berlanjutnya gerakan perlawanan rakyat Ethiopia (Sulistiowati, 2021). Selain itu, karena kurangnya modal di Italia, banyak bahan mentah yang ditambang tidak dapat dikembangkan sesuai rencana semula.

Setelah Italia menaklukkan Ethiopia, terjadi perubahan kebijakan luar negeri. Italia mengubah arah dari Sekutu dan menuju Jerman. Hal ini karena Jerman tidak ikut serta dalam sanksi negara terhadap Italia dan karena Jerman mengakui Italia karena kekuasaannya di Ethiopia. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa hubungan Ethiopia, Eritrea, dan Libya dengan Barat mempengaruhi apa yang melatarbelakangi terjadinya kerusuhan di Ethiopia, Eritrea, dan Libya, antara lain:

1. Pembagian wilayah Afrika secara sepihak oleh Eropa pada Konferensi Berlin Kedua. Kongres Berlin Kedua (1885) merupakan konferensi pertama yang membahas isu-isu mengenai Afrika. Konferensi ini dihadiri oleh seluruh negara di benua Eropa kecuali Swiss, Balkan, dan Amerika Serikat. Konferensi tersebut diakhiri dengan pembagian benua Afrika secara sepihak oleh Eropa. Konferensi Berlin pada akhirnya menghasilkan penetapan batas wilayah hingga berakhirnya masa kolonial.
2. Perluasan wilayah jajahan negara-negara Eropa pada masa penjajahan menimbulkan kerusuhan fisik dan peperangan, serta menimbulkan manuver politik antar negara-negara Eropa dengan tujuan berbeda.
3. Perjanjian kekuasaan dibuat, disengketakan atau tidak, untuk mencapai kesepakatan di antara negara-negara Eropa mengenai batas-batas wilayah kolonial dan pengaruhnya di Afrika. Dan hal ini menimbulkan konflik terbuka setelah bangsa Eropa meninggalkan benua Afrika.
4. Mengingat ketidakpastian seputar batas-batas wilayah setelah penarikan orang-orang Eropa dari Afrika, khususnya Ethiopia dan wilayah sekitarnya, para pemimpin regional ingin memperluas wilayah mereka melalui sengketa wilayah dan penggunaan kekuatan, yang dapat menyebabkan ketidakamanan (Ocheni & Nwankwo, 2012).

B. Proses Pergolakan di Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya

1. Masa Kolonisasi di Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Pada tahun 1875, sekitar 10,8% wilayah Afrika berada di bawah pengaruh Barat. Saat itu, wilayah Afrika seluas 1,25 juta meter persegi dimiliki oleh Spanyol, Portugal, Prancis, dan Inggris. Inggris memiliki sebagian besar wilayah Afrika. Ketertarikan Barat terhadap Afrika meningkat ketika S. M. Stanley, seorang penjelajah terkemuka, menemukan kekayaan keindahan alam Afrika (Riyadi, 2016). Berkat

pengalaman para penjelajah tersebut, negara-negara Barat menjadi tertarik untuk memperoleh tanah dan memperluas wilayahnya. Alasan terjadinya perebutan Afrika adalah karena Afrika memiliki potensi perdagangan yang besar, penting untuk memenuhi kebutuhan industri, penduduk di kawasan Afrika dapat digunakan sebagai kekuatan tempur, merupakan basis strategis untuk perang, dan Hal ini karena ruang angkasa memiliki kemungkinan. Digunakan sebagai tempat pemukiman kembali atau evakuasi. Tahun 1885-1900 merupakan masa ekspansi paling kuat bagi negara-negara Eropa (Erlina, 2019). Pada saat ini pula, Eropa Barat menunjukkan bahwa mereka akan mendominasi dunia. Pada awal tahun 1876, 10,8% wilayah Afrika berada di bawah kendali Barat, namun pada tahun 1900 proporsi ini melonjak hingga hampir 90,4%. Artinya luas wilayahnya telah meningkat sekitar 79,6% dalam seperempat abad.

Konferensi Berlin tahun 1885 merupakan konferensi pertama yang membahas masalah-masalah Barat mengenai Afrika. Negara-negara peserta konferensi ini antara lain Swiss, Balkan, dan hampir seluruh negara Eropa kecuali Amerika Serikat (Watt, 1971). Pada konferensi ini, nasib kapal-kapal Kongo yang berlayar di dalam dan sekitar Sungai Niger serta masalah perbudakan diputuskan. Setelah konferensi tersebut, pembagian benua Afrika oleh negara-negara Eropa dimulai. Persaingan antara negara-negara ini tidak bisa dihindari dan bahkan seringkali berujung pada krisis, namun krisis tersebut tidak pernah berujung pada perang. Perjanjian atau kesepakatan internasional dibuat untuk mengatasi masalah ini. Pada tahun 1890, perjanjian Inggris-Jerman ditandatangani dengan tujuan memenangkan persaingan di Afrika Timur. Pada tahun 1898, Perjanjian Inggris-Prancis ditandatangani, dan masalah Fashoda dibahas di sana (Sulistiowati, 2021). Terjadi kesepakatan antara Inggris Raya, Italia, dan Portugal untuk menentukan batas wilayah masing-masing.



Gambar 4. Ilustrasi Masa Kolonisasi Italia di Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Sumber: <https://images.app.goo.gl/geHZdo9JoKr3izkJ8>

Perjanjian antara Inggris, Italia, dan Portugal menjadikan Ethiopia sebagai negara yang terkurung daratan. Italia berhasil menguasai Eritrea, dan negara-negara Eropa membagi wilayah pesisir Somalia berdasarkan ketentuan yang menjamin jalur laut untuk perdagangan Ethiopia (Sulistiowati, 2021). Ethiopia kehilangan kedaulatan atas beberapa wilayah pesisir dan sebagian wilayah Eritrea. Hal ini membawa keuntungan khusus bagi Etiopia: pengakuan kemerdekaan Etiopia dan perluasan Etiopia untuk mengusir penjajah asing. Ketika era Italia berakhir, kedaulatan Ethiopia dikembalikan ke Haile Selassie I pada tahun 1941 (ARYANI, 2010). Namun, Inggris terus menguasai sebagian Somalia selatan selama beberapa tahun hingga Inggris

mengembalikan kekuasaan ke Ethiopia dan memulihkan masalah perbatasan sesuai dengan pengaturan yang telah disepakati sebelumnya.

C. Masa Pergolakan di Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Sebuah catatan sejarah Afrika yang penuh dengan sengketa perbatasan dan pemberontakan separatis. Organisation of African Unity (OAU) seringkali tidak mampu menemukan solusi (Wicaksana & Rachman, 2018). Beberapa negara asing mencakup seluruh angkatan bersenjata dan kelompok penasihat militer, sementara negara lain mempertaruhkan kemerdekaannya. Transisi yang mudah menuju kelompok masyarakat pascakolonial mandiri yang dapat berkembang secara mandiri. Hal ini dianggap mustahil dilakukan di negara-negara berkembang di Afrika. Mengingat banyaknya permasalahan struktural dan warisan budaya masa pra-kolonial dan kolonial, sungguh mengejutkan bahwa perdamaian sudah ada sejak proses pembentukan negara modern dimulai dan mulai berkembang pada tahun 1950-an (Riyadi, 2016). Sejak itu, peperangan dan pertempuran terus berlanjut.

Situasi ini selaras dengan situasi di Eropa dan Asia yang masih didominasi oleh kegigihan nasionalis yang kemudian berujung pada konflik. Salah satu negara yang memberikan contoh nyata adalah Ethiopia. Etiopia mungkin merupakan gejala penyakit yang umum, namun mungkin merupakan kondisi yang luar biasa karena Etiopia adalah negara merdeka dan bukan koloni Eropa (Kresna et al., 2018). Namun, karakter Etiopia yang luar biasa dilemahkan oleh fakta bahwa sebagian besar perbatasan Etiopia tercipta akibat pengepungan imperialis. Kaisar Menelik menerima wilayah Ogaden di Somalia berdasarkan perjanjian partisi dengan Italia dan Inggris Raya. Ini adalah tindakan kolonial, dan jika aturan yang sama diterapkan pada koloni, Ethiopia juga harus menjalani dekolonisasi. Diperkirakan tidak akan ada perdamaian di kawasan sebelum dekolonisasi.



Gambar 5. Peta Masa Pergolakan Ethiopia Dan Eritrea

Sumber: <https://images.app.goo.gl/vpwKHu3mPgoGuPFp8>

Intervensi asing terkadang disebut-sebut sebagai alasan penting mengapa konflik-konflik yang terjadi saat ini belum terselesaikan melalui penyerahan kedaulatan Afrika atau penyatuan kedaulatan melalui sebuah federasi. Tidak ada keraguan bahwa hal ini memang terjadi, dan hingga tahun 1976 intervensi asing dalam bentuk bantuan militer dari Amerika Serikat atau bantuan dari Uni Soviet dan Kuba mendukung aneksasi Ethiopia (Zulham, 2016). Faktanya, jika negara-negara Afrika yang bersangkutan mampu melakukan hal tersebut, intervensi asing tidak akan mampu mencegah penyesuaian bertahap perbatasan yang diwarisi dari kolonialisme. Salah satu bentuk kerusuhan yang menimpa Ethiopia, Eritrea, dan Libya adalah konflik Ogaden. Konflik yang pecah pada bulan Juni 1977 di Ogaden antara Ethiopia dan Somalia meningkat menjadi perang (Erlina, 2019).

Ethiopia mampu mengakhiri perang dengan bantuan militer dari Uni Soviet dan Kuba. Namun konflik terus berlanjut, Somalia memperebutkan wilayah Ogaden, dan gerakan Front Pembebasan Somalia Barat juga terus memperebutkan wilayah.

D. Dampak dari Kolonisasi dan Kekuasaan Italia di Negara Ethiopia, Eritrea, Dan Libya

1. Dampak Kolonisasi Italia di Libya

Sejarah penjajahan Italia di Libya dimulai pada masa perang Italia dengan Turki pada tahun 1911. Pada saat itu, wilayah Libya terdiri dari tiga wilayah, Tripolitania, Fezzan, dan Cyrenaica, yang merupakan bagian dari provinsi Kekaisaran Ottoman di Afrika Utara (Grigoriadis & Kassem, 2021). Ada dua aliran nasionalisme imperial yang kontradiktif di wilayah ini. Pada tanggal 2 Oktober 1911, pasukan Italia mendarat di pelabuhan Tripoli dan membombardir benteng di sekitar kota. Perang berlanjut hingga Perjanjian Ussi tahun 1912 dan pecahnya Perang Balkan Pertama, yang memaksa Turki Utsmaniyah mundur dari perang dan membiarkan penduduk ketiga wilayah tersebut berjuang sendirian mencari tempat tinggal.

Italia menggabungkan ketiga wilayah tersebut menjadi satu unit administratif dan menamainya Libya. Istilah ini berasal dari nama provinsi Romawi kuno, yang dimaksudkan untuk mengasosiasikan Kekaisaran Italia dengan kejayaan nasionalnya. Dari segi geografis, tujuan Benito Mussolini adalah menjadikan Tripolitania sebagai wilayah pesisir keempat di Italia (Nasution, 2022). Dari segi ideologi, imperialisme ini diharapkan mampu menghancurkan pemerintahan dan sistem sosial Islam yang telah mapan selama berabad-abad dan menggantikannya dengan budaya Kristen yang tidak sejalan dengan Islam. Ini adalah kesalahan fatal Italia, yang memicu pemberontakan selama seperempat abad dan pertempuran berdarah antara Italia dan Libya.



Gambar 6. Perlawanan Libya kepada invansi Italia

Sumber: <https://images.app.goo.gl/kJMWaoYKvY5FbJxs6>

Untuk menekan pemberontakan dan pertempuran, Italia melakukan berbagai kejahatan, setelah itu Libya menuntut reparasi. Hal ini termasuk (1) genosida atau pembunuhan berencana terhadap ribuan warga Libya karena kelalaian medis yang disengaja, pembunuhan dan kematian baik dalam peperangan perkotaan maupun di kamp konsentrasi, (2) musnahnya nyawa manusia baik secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, (3) musnahnya lingkungan hidup akibat peletakan ranjau darat yang mengancam kehidupan masyarakat Libya khususnya pada masa Perang Dunia II, (4) Penghapusan paksa dan penghancuran moral maupun budaya dengan membagi warga Libya menjadi "pengkhianat Libya" (mendukung Italia) dan "warga Libya sebenarnya" (Watt, 1971). Hal ini menghancurkan landasan psikologis, moral dan budaya masyarakat Libya. Dengan cara

tersebut, Italia akhirnya berhasil menguasai seluruh Libya pada tahun 1932.

Selama pemerintahannya di Libya, Italia menjajah negara tersebut secara demografis. Pendekatan Mussolini terhadap kebijakan kependudukan terinspirasi oleh teori Corradi Gini, seorang ilmuwan Italia yang terkenal atas kontribusinya pada demografi dan genetika (ARYANI, 2010). Gini menolak gagasan bahwa perkawinan silang menghasilkan varietas yang kurang produktif dan berkualitas rendah. Menurutnya, bukti sejarah menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu, berbagai ras selalu bersatu dan bercampur dengan ras-ras yang dekaden dan vital untuk melahirkan ras-ras baru dengan generasi biologis. Kolonisasi Libya akan fokus pada sektor pertanian, karena struktur lahan Libya adalah surga bagi para petani. Pada tahun 1938, rencana ini diwujudkan melalui emigrasi massal 20.000 petani Italia ke Libya di bawah arahan langsung Gubernur Libya Italo Balbo.

Rangkaian rencana ini gagal setelah terjadinya penjajahan, terutama setelah Perang Dunia II. Beberapa tahun sebelum pecahnya perang, Italia kehilangan kendali de facto atas beberapa koloninya di Afrika, khususnya Libya. Tripolitania dan Cyrenaica berhasil ditaklukkan oleh Administrasi Militer Inggris (BMA), dan Fezzane diduduki oleh pasukan Perancis Merdeka pada tahun 1943 (Riyadi, 2016). Pasal 23 Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1947 secara resmi memisahkan ketiga wilayah ini dari Italia, dan nasib masa depan mereka ditentukan berdasarkan hasil Perang Dunia II. Libya akhirnya mencapai kemerdekaan penuh pada bulan Desember 1951 sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB yang menetapkan pembebasannya pada tanggal 1 Januari 1952.

Berakhirnya penjajahan Italia tidak berarti pengaruh dan kekuasaan Italia hilang sama sekali. Italia secara aktif menjalankan proyek pertanian yang mengharuskan petani Italia untuk terus menggarap lahan pertanian Libya (Riyadi, 2016). Proyek ini diawasi oleh Institut Nasional untuk Jaminan Sosial Italia, sebuah badan paranasional, dan dilaksanakan dengan tujuan menghentikan gerakan pemberontak para penggembala Libya dan petani Italia, yang telah menyebabkan emigrasi massal ke luar negeri. Namun, proyek tersebut gagal dan pihak berwenang Italia memutuskan untuk menjual tanah tersebut kepada penduduk setempat dan kembali ke tanah air mereka. Pada tahun 1961, hampir 70% lahan pertanian petani Italia dijual (Ocheni & Nwankwo, 2012). Pada tahun 1964, masih ada 120 petani Italia di Libya.

2. Krisis Ethiopia

Terjadi konflik antara Etiopia dan Eritrea yang berujung pada krisis di Etiopia. Dengan janji untuk menyelesaikan konflik, Hailemariam Desalegn melanjutkan upayanya untuk menormalisasi hubungan dengan Eritrea (Riyadi, 2016). Namun hubungan diplomatik antara Ethiopia dan Eritrea mengalami pasang surut selama dekade terakhir, dan kurangnya dukungan dari pemerintah yang berkuasa membuat penyelesaian konflik menjadi sulit. Hal ini didukung oleh perubahan cara pandang di kalangan masyarakat Ethiopia dan Eritrea, yang meyakini bahwa konflik yang terjadi saat ini bukan hanya sebatas sengketa perbatasan, namun merupakan upaya untuk melindungi reputasi kedua negara (Berouk, 2008). Dampaknya, Ethiopia mengisolasi Eritrea dari berbagai kancan internasional, dan peluang perdamaian kedua negara pun semakin berkurang.

Hal ini berimplikasi pada munculnya krisis politik akibat reformasi politik dan ekonomi. Ethiopia mengalami kekeringan berkepanjangan, yang berpuncak pada kelaparan yang tak

terelakkan. Krisis politik yang telah lama tidak terselesaikan dan menyebabkan ratusan orang tewas dan terus memburuk, melemahkan pemerintahan yang berkuasa (Riyadi, 2016). Akibatnya, Hiemariam Desalegn terpaksa melepaskan kendali pemerintahan.

E. Rangkuman

Italia memiliki kerajaan kolonial di Libya dan Afrika Timur, seperti Ethiopia bahkan Eritrea pada paruh pertama abad ke-20. Meskipun lebih dari separuh dari mereka mempunyai sikap menghormati kehidupan masyarakat adat dan manfaat peradaban yang diberikan oleh pemerintah kolonial, tetapi hampir seperempatnya mempunyai sikap yang menunjukkan kejahatan dari kekuasaan mereka. Pendominasian terhadap kehidupan masyarakat adat dan penanaman peradaban dari pemerintah kolonial memiliki dominasi yang sangat merugikan masyarakat lokal Libya, Ethiopia, dan Eritrea khususnya di Afrika Timur. Secara keseluruhan, terutama sejak tahun 1930-an dan seterusnya, gambaran eksotisme muncul, memperkuat gagasan bangsa Italia sebagai sebuah kerajaan baru yang bertujuan untuk menampilkan dirinya kepada dunia dalam bentuk kolonisasi dan perluasan wilayah yang berorientasi pada pertanian maupun ekonomi.

F. Latihan

Kerjakanlah latihan berikut ini!

1. Bagaimanakah Koloni Italia di wilayah Afrika?
2. Bagaimanakah sejarah pergolakan di Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya?
3. Bagaimanakah proses pergolakan di Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya?
4. Apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari kolonisasi dan kekuasaan Italia di Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya?

G. Rujukan

- ARYANI, R. (2010). *Fasisme Italia 1922-1944*. UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- Berouk, M. (2008). Situation Report The Eritrea-Djibouti border dispute. *Institute for Security Studies Situation Report*, 1–19.
- Erlina, M. (2019). KONFLIK DI KAWASAN TANDUK AFRIKA: ERITREA DAN ETHIOPIA TETANGGA YANG SULIT AKUR Meri. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(1).
- Grigoriadis, T. N., & Kassem, W. (2021). The Regional Origins of the Libyan Conflict. *Middle East Policy*, 28(2). <https://doi.org/10.1111/mepo.12560>
- Indrawan, J. (2013). Legalitas dan Motivasi NATO Legalitas dan Motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4(2).
- James, W. (1890). TREATY OF WUCHALE UMBERTO. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1(1).
- Kresna, M., Hakam, S., Fuady, H., & Erwiza. (2018). Ringkasan Hasil Penelitian: Pertumbuhan Dan Pembangunan Di Sub-Sahara Afrika: Pengalaman Ethiopia. *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(2).
- Mesfin, B. (2008). *The Eritrea-Djibouti border dispute*. Institute for Security Studies : Situation Report 2.
- Nasution, A. E. M. (2022). *ANALISIS FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KERJASAMA MIGRASI ITALIA DAN LIBYA TAHUN 2017*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Njoo, F. (2008). Peranan Adolf Hitler Dalam Perang Dunia Ii 1939-1945. In *PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH*. UNIVERSITAS SANATA DHARMA.
- Ocheni, S., & Nwankwo, B. C. (2012). Analysis of colonialism and its impact in Africa. *Cross-Cultural Communication*, 8(3).

- Pankhurst, R. (1999). Italian Fascist War Crimes in Ethiopia: A History of Their Discussion, from the League of Nations to the United Nations (1936-1949). *Northeast African Studies*, 6(1).
- Riyadi. (2016). Sejarah Afrika Dari Masa Kuno Sampai Modern. In *Unesa Press*. Unesa Press.
- Sulistiowati, I. (2021). Gejolak Politik Dan Ekonomi Afrika Pasca Perang Dunia II. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 17(1).
- Watt, D. C. (1971). Document: The Secret Laval-Mussolini Agreement of 1935 on Ethiopia. *The Origins of the Second World War*, 15.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Bentuk dan Sistem Negara. *Angewandte Chemie International Edition*, 3(1).
- Zulham. (2016). Reintegrasi Etno-Nasionalisme Separatis Pada Nasionalisem Indonesia Raya: Studi Etni-Nasionalisme Aceh Pasca Damai. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, 2(2).